BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

“Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum”

“Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.²”

“Menegenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan diperlukan beberapa tahap-tahap agar dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan menentukan siapa orang yang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapannya. Tahap-tahap dalam penyelidikan itu sendiri diatur di dalam Peraturan Kepala

¹ JE. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36

² Hartono. 2014. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 yang berisi sebagai berikut:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian Berkas Perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
9. Penghentian penyidikan”

“Pada bulan april 2020 masyarakat sumatera utara khusus nya Kota Medan dan Deli Serdang di gemparkan dengan peristiwa yang sangat serius, yakni ditemukannya sesosok mayat berjenis kelamin perempuan dengan identitas bernama Juliana Liem. Juliana liem diketahui seorang mahasiswi fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia, yang juga berkerja di salah satu perusahaan di kota medan yang bergerak dibidang sublayer barang bangunan, dengan *job description* sebagai penyusun laporan pajak PPN barang keluar.”

“Kematian pastinya membawa akibat yang sangat buruk didunia pendidikan, sehingga hal tersebut terjadi pada korban yang dinilai memiliki potensi dan dikenal sebagai mahasiswi yang berprestasi dikampusnya. Universitas Prima Indonesia sangat berduka atas kematian Juliana Liem, tidak terkecuali bagi rekan alm dimana berkerja bahwa ia diketahui telah meninggal dunia berdasarkan *Surat Keterangan Kematian No. Pol : SKT/72/IV/2020/RS/DISKOKKES* tanggal 30 April 2020 pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat dijalan menuju Lau Kala dusun I Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang.³”

Kematian Juliana Liem berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp, pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan dugaan pasal :

³ *Surat Keterangan Kematian No. Pol : SKT/72/IV/2020/RS/DISKOKKES*

1. **Pasal 365 ayat 4 (KUHPidana)** , *“diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun, bila perbuatan (pencurian) itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor satu dan tiga.”*
2. **Pasal 339 KUHP**, *“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun berserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
3. **Pasal 55 ayat 1 kesatu** *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”*
4. **Pasal 338 KUHP**, *“barang siapa yang merampas nyawa orang lain diancam pidana pembunuhan dengan pidana penjara 15 (lima belas tahun)*
5. **Pasal 55 ayat 1 kesatu** *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”*

“Seiring dengan sangkaan pasal alternatif yang diajukan oleh pihak kepolisian, maka dakwaan jaksa penuntut umum juga berbentuk alternatif artinya dengan kata lain dakwaan yang satu menjadi “pengganti” dakwaan lainnya (*one that substitutes for another*), disebabkan jaksa penuntut umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga menawarkan pilihan (*option*) kepada majelis hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴”

“Pada akhirnya demi efisiennya putusan majelis hakim langsung membahas dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa, yakni dakwaan pertama melanggar ketentuan pasal 365 ayat (4) KUHPidana, sehingga

⁴ Marfuatul Latifah, Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Jurnal Negara Hukum, Volume 5 No. 1, Juni 2014, hlm. 33.

pada akhirnya dijatuhkan pidana TOMY KELIAT oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun”

1.2. Rumusan Masalah

1. “Bagaimanakah proses penyelidikan yang dilakukan yang dilakukan pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Juliana Liem, berdasarkan putusan Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp.
2. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Juliana Liem, berdasarkan putusan Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp.
3. Apakah yang menjadi latar belakang majelis hakim memilih pasal 365 ayat 4 sebagai pasal yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp”

1.3. Tujuan Penelitian

“Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Juliana Liem berdasarkan putusan Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Juliana Liem putusan Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian yang menjadi latar belakang majelis hakim memilih pasal 365 ayat 4 sebagai pasal yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp”

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. “Secara Teoritis

Bahwa secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana sekaligus memberikan pengetahuan hukum bagi para akademisi, penulis, dan mahasiswa hukum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2. Secara Praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum terutama aparat kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian”

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi

Bahwa adapun kerangka teori dan konsepsi dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Kerangka teori

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi adalah bagian penting dari Kerangka Teori yang dapat diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubitus) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan”